



**EVALUASI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* PEMERINTAH
DESA TUMPANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN
BLITAR**
(Studi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Batik Selo Putri Dalam Program
One Village One Product)

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik

Oleh
ABID ARRASIBI MUFTI
NPM 21901091002



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2023**

Ringkasan

Abid Arrasibi Mufti. 2023. Evaluasi *Collaborative Governance* Pemerintah Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Batik Selo Putri Dalam Program *One Village One Product*). Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int. Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc. 117 Halaman + xv.

One Village One Product (OVOP) adalah pendekatan untuk pengembangan potensi daerah guna menghasilkan suatu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Sehingga cocok untuk diimplementasikan di Indonesia, dan salah satunya adalah Desa Tumpang di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. *Collaborative governance* dalam *OVOP* dimulai dari diadakannya pelatihan membatik oleh Pemerintah Desa Tumpang kepada masyarakat yang kemudian melahirkan produk Batik Selo Putri yang didirikan oleh mantan peserta pelatihan. Kemudian Pemerintah Desa Tumpang menggandeng Batik Selo Putri untuk berkolaborasi dalam pembangunan desa disektor ekonomi seperti pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan membatik dan pengembangan usaha Batik Selo Putri agar dapat menjadi salah satu *icon* dari Desa Tumpang. Akan tetapi kolaborasi tersebut terdapat beberapa permasalahan, seperti tidak adanya peraturan ataupun informasi *detail* terkait *OVOP* dan tidak adanya *follow up* dari Pemerintah Desa Tumpang kepada peserta kolaborasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian kemudian dibahas menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash, yaitu: *Starting Condition, Institutional Design, Kepemimpinan Fasilitatif, dan Collaborative Process* yang di dalamnya terdapat *face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, dan intermediate outcomes*. Bahwa *collaborative governance* antara Pemerintah Desa Tumpang dengan Batik Selo Putri dalam program *OVOP* sudah dilakukan dan berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi masih terdapat kekurangan, seperti peran dan komitmen dari Pemerintah Desa Tumpang masih kurang, hingga hasil yang diharapkan dari kolaborasi masih belum maksimal. Hal itu dikarenakan tidak adanya *follow up* oleh Pemerintah Desa Tumpang terhadap Batik Selo Putri maupun masyarakat peserta pelatihan dan tidak adanya peraturan dasar kolaborasi maupun kontrak kerja sama atau *MOU*.

Kata Kunci: Evaluasi, *Collaborative governance, One Village One Product*.

Summary

Abid Arrasibi Mufti. 2023. *Evaluation of Collaborative Governance of the Government of Tumpang Village, Talun District, Blitar Regency (Study on Micro, Small and Medium Enterprises, Batik Selo Putri in the One Village One Product Program)*. Hirshi Anadza, S.Hub.Int., M.Hub.Int. Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc. 117 Pages + xv.

One Village One Product (OVOP) is an approach to developing regional potential to produce a unique and distinctive global class product by utilizing local resources. So it is suitable for implementation in Indonesia, and one of them is Tumpang Village in Talun District, Blitar Regency. Collaborative governance in OVOP began with the holding of batik training by the Tumpang Village Government for the community which later gave birth to the Selo Putri Batik product which was founded by former training participants. Then the Tumpang Village Government took Batik Selo Putri to collaborate in village development in the economic sector such as empowering village communities through batik training and developing the Selo Putri Batik business so that it could become one of the icons of Tumpang Village. However, this collaboration has several problems, such as the absence of regulations or detailed information regarding OVOP and the absence of follow-up from the Tumpang Village Government to the collaboration participants. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research are then discussed using collaborative governance theory from Ansell and Gash, namely: Starting Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership, and Collaborative Process which includes face to face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. That collaborative governance between the Tumpang Village Government and Batik Selo Putri in the OVOP program has been carried out and is running quite well. However, there are still deficiencies, such as the lack of role and commitment from the Overlapping Village Government, so that the expected results of the collaboration are still not optimal. This is due to the absence of follow-up by the Tumpang Village Government for Batik Selo Putri and the community participating in the training and there are no basic regulations for collaboration or cooperation contracts or MOUs.

Keywords: Evaluation, Collaborative governance, One Village One Product.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum adalah dengan cara membangun ekonomi daerah dan salah satu cara untuk membangun ekonomi daerah adalah melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Oleh karena itu, banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk menunjang produktifitas UMKM, salah satunya melalui program *One Village One Product (OVOP)*.

Program *OVOP* dirintis oleh Prof. Morihiko Hiramatsu yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Oita, Jepang tahun 1980. Konsep ini berkembang dan diadaptasi oleh negara-negara *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* seperti: Malaysia, Philipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Thailand, negara-negara di Asia Selatan, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Selatan (*OVOP* Indonesia, n. d).

Program tersebut sudah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia hingga saat ini, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Karena konsep *OVOP* tersebut dimana suatu daerah menetapkan suatu produk yang memiliki keunikan untuk dikembangkan sehingga akan memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Yang selanjutnya akan memberikan kontribusi pendapatan cukup

besar bagi daerah tersebut, dan kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut (*OVOP* Indonesia, n. d).

Pengertian *OVOP* menurut Kementerian Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di suatu wilayah untuk menghasilkan suatu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Suatu wilayah sebagaimana dimaksud dapat diperluas artinya menjadi desa, kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis (Bappeda Kab. Tuban, September 20, 2021).

Tujuan dari *OVOP* sendiri yaitu untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal, dari sumber daya yang bersifat unik/khas di suatu daerah dan bernilai tambah tinggi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki *image*, dan daya saing yang tinggi. Selain itu juga untuk pengembangan UMKM yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun global (Bappeda Kab. Tuban, September 20, 2021).

OVOP di Indonesia umumnya adalah UMKM yang konsisten menjalin kerjasama dengan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ataupun instansi pemerintah dan terus mendapat bimbingan serta bantuan dari pemerintah. Hal ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan mewakili identitas daerah bahkan negara. Dimana produk-produknya mencerminkan keunikan suatu daerah atau desa. Dengan keunggulan yang dimiliki, maka produk tersebut dapat meningkatkan pendapatan bagi daerahnya, melalui kunjungan turis, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ketrampilan SDM. Di

Indonesia terdapat sekitar 74.000 desa yang memiliki keunikan atau ciri khas. Dimana mayoritas atau sekitar 65% penduduknya masih tergolong miskin atau berpendapatan rendah. Dan mayoritas desa-desa tersebut eksis disektor pertanian atau agrikultur. Dengan kultur tersebut, sangat potensial dikembangkan *OVOP* (*OVOP* Indonesia, n. d).

Program *OVOP* dinilai cocok untuk diimplementasikan di daerah-daerah di Indonesia yang beranekaragam, agar potensi produk lokal daerah dapat bersaing di pasar nasional hingga internasional. Berhubung di Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah, sehingga membuat program tersebut dapat langsung diimplementasikan sesuai peraturan pemerintah daerah masing-masing. Hal penting yang perlu di perhatikan dalam pengembangan UMKM dalam program *OVOP* tersebut, yaitu pengembangan ini memerlukan potensi daerah, sumber daya manusia, dan kolaborasi.

Program *OVOP* diterbitkan sebagai salah satu pogram prioritas untuk pembangunan nasional (Wahyudiono, 2019: 145). Dimana hal tersebut didukung dengan adanya landasan-landasan hukum dalam pelaksanaan *OVOP*, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang mengamanatkan pengembangan sentra melalui Pendekatan *OVOP*).

4. Keputusan Rapat Kerja Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komisi VI DPR-RI tahun 2008.

Kemudian di Indonesia program *OVOP* mulai dilaksanakan pada tahun 2008 oleh Kementerian UKMK dan sudah diimplementasikan di berbagai daerah, salah satunya adalah di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur yang mulai mengimplementasikannya pada tahun 2022. Di Kabupaten Blitar sendiri implementasi program *OVOP* gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar guna membangkitkan perekonomian di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Blitar mulai merintis program *OVOP* sebagai upaya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat agar bangkit setelah Pandemi *Covid-19* (Alana, Februari 3, 2022).

Dalam rangka implementasi program *OVOP*, Bupati Blitar Rini Syarifah didampingi oleh asisten, Kepala OPD, dan perwakilan perbankan berkunjung ke berbagai desa untuk meninjau potensi unggulan di setiap desa. Kunjungan ini dilakukan guna mengenalkan program *OVOP* ke desa dan mendorong terciptanya *OVOP* di masing-masing desa tersebut sehingga mampu menumbuhkan perekonomian di desa. Kunjungan juga dilakukan guna melihat secara langsung kemampuan ekonomi para pelaku UMKM dan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa mulai dari pengelolaan produk, pemasaran, hingga permodalan (Kominfo Jatim, Februari 24, 2022).

Bupati Blitar mengatakan, dengan adanya program ini potensi-potensi yang ada di Kabupaten Blitar dapat semakin dikenal secara luas sehingga berimbas positif terhadap roda perekonomian. Langkah ini terus dilanjutkan

dengan kegiatan sambang desa dalam seminggu sekali. Bupati juga mendorong peran aktif dari pemerintah daerah guna membangkitkan roda perekonomian masyarakat melalui produk unggulan yang ada di desa/kelurahan masing-masing (Alana, Januari 18, 2022).

Kemudian di Kabupaten Blitar sendiri juga sudah terdapat beberapa wilayah yang mengimplementasikan program *OVOP*, salah satunya adalah Desa Tumpang di Kecamatan Talun. Implementasi program *OVOP* di Desa Tumpang sendiri dimulai dengan melahirkan produknya seperti brownis, olahan kripik, kerajinan sepatu, jamur, olahan minuman toga, dan yang menjadi produk unggulan adalah Batik Selo Putri. Dalam mendukung implementasi program *OVOP* di Desa Tumpang, Bupati Blitar berkunjung langsung ke Desa Tumpang Kecamatan Talun. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Blitar juga melihat langsung produksi UMKM seperti, Batik Selo Putri (Novi, Oktober 15, 2022).



Gambar 1. Kunjungan Bupati Blitar Ke Griya Batik Selo Putri

(Sumber: mitratoday.com, 2022)

Batik Selo Putri sendiri berawal pada tahun 2019 dari sekelompok ibu-ibu PKK yang diberikan pelatihan membatik oleh Pemerintah Desa Tumpang. Nama “Selo Putri” diberikan oleh sepasang suami-isteri bernama Hasanuddin dan Binti. Ibu Binti mengungkapkan, pada tahun 2019 Kepala Desa Tumpang Agus Salim mengajak sekelompok ibu-ibu yang akan diberikan pelatihan dan keterampilan dalam upaya untuk melestarikan keberadaan batik di Desa Tumpang agar tetap berjalan dan berkembang yang ke depannya dapat menjadi penopang kesejahteraan dan ekonomi. Kemudian setelah dilakukannya pelatihan yang pertama oleh Pemerintah Desa Tumpang tersebut beberapa peserta terus mengasah kemampuannya dan menjadikan batik sebagai usaha yang kemudian terciptalah Griya Batik Selo Putri pada tahun 2020.

Untuk pemasarannya sendiri sudah mencapai pasar nasional dan berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Tumpang untuk memperkenalkan ke instansi daerah lainnya. Selain itu, untuk memperkenalkan produk Batik Selo Putri juga turut serta mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah seperti menjadi sponsor untuk acara pemilihan duta pariwisata Kabupaten Blitar yaitu Gus Jeng Kabupaten Blitar dan ikut berpartisipasi dalam ajang pemilihan duta pariwisata Jawa Timur yaitu Raka dan Raki Jawa Timur. Hingga Batik Selo Putri terpilih sebagai produk unggulan *OVOP* dari Desa Tumpang.

Akan tetapi kolaborasi antara Pemerintah Desa Tumpang dan Batik Selo Putri dalam program *OVOP* tersebut terdapat beberapa permasalahan. Dimana tidak adanya peraturan maupun informasi *detail* terkait program *OVOP* oleh Pemerintah Desa Tumpang hingga tidak adanya *follow up* dari Pemerintah Desa

Tumpang kepada Batik Selo Putri maupun pelaku UMKM lainnya terkait kelanjutan dari program *OVOP*. Yang seharusnya produk yang sudah masuk ke dalam *OVOP* akan mendapatkan keuntungan seperti pendampingan dan pelatihan berkelanjutan serta bantuan permodalan. Akan tetapi tidak adanya *follow up* dari Pemerintah Desa Tumpang membuat pelaku UMKM terkesan seperti berjuang sendirian.

Di sini sinergisitas antara Pemerintah Desa Tumpang dengan pelaku UMKM Batik Selo Putri dibutuhkan dalam pengimplementasian program *OVOP* sebagai *pioneer* guna lebih meningkatkan produk-produk unggulan lainnya di Desa Tumpang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tumpang. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai “*Collaborative Governance* Pemerintah Desa Tumpang Dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Batik Selo Putri Dalam Program *One Village One Product*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah jabarkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana *Colaborative Governance* Pemerintah Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Batik Selo Putri Dalam Program *One Village One Product* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis *collaborative governance* pemerintah desa dengan pelaku UMKM dalam program *OVOP*. Khususnya di Desa Tumpang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dengan Batik Selo Putri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan, serta dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya tentang *Collaborative Governance* dalam pengimplementasian suatu program untuk desa khususnya program *OVOP*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti, serta bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut tentang *Collaborative Governance* dalam pengimplementasian program *OVOP*.

b. Bagi Universitas Islam Malang

Untuk menambah koleksi pustaka serta menjadi referensi bagi mahasiswa program studi Administrasi Publik pada khususnya dan seluruh mahasiswa Universitas Islam Malang pada umumnya.

c. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengimplementasian program-program pemerintah agar bisa menjadi lebih baik lagi dan dapat menjadi bahan referensi untuk pemerintah daerah lainnya dalam hal *collaborative governance*.

E. Sistematika Pembahasan

1. Bab I: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian yaitu gambaran umum mengenai *Collaborative Governance* Pemerintah Desa Tumpang dengan pelaku UMKM Batik Selo Putri dalam Program *OVOP*. Selain itu juga menjabarkan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat peneliti, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini merupakan pemaparan dan uraian teori sebagai tinjauan yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam bab ini juga bisa digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah diperoleh peneliti di lapangan.

3. Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian sendiri terdiri dari jenis penelitian, fokus

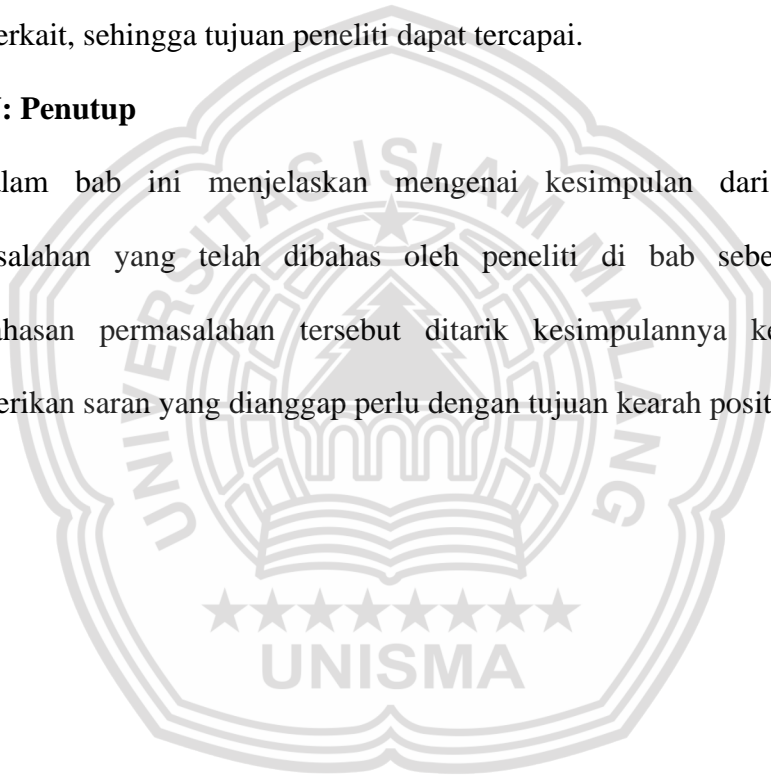
penelitian, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

4. Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini menjabarkan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan yang kemudian diolah untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi pada tahap analisis yang kemudian diinterpretasikan melalui teori yang terkait, sehingga tujuan peneliti dapat tercapai.

5. Bab V: Penutup

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari semua permasalahan yang telah dibahas oleh peneliti di bab sebelumnya. Pembahasan permasalahan tersebut ditarik kesimpulannya kemudian memberikan saran yang dianggap perlu dengan tujuan kearah positif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Collaborative Governance* antara Pemerintah Desa Tumpang dengan Batik Selo Putri dalam program *OVOP* yang telah dilakukan pembahasan di atas menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Collaborative Governance* antara Pemerintah Desa Tumpang dengan Batik Selo Putri dalam program *OVOP* dinilai sudah baik. Terutama pada:
 - a. *Starting Condition* (Kondisi Awal). Dimana kedua belah pihak sepakat untuk berkolaborasi. Karena kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama yaitu perbaikan perekonomian pasca Pandemi *Covid-19* melalui program *OVOP* dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengadakan pelatihan membuat batik.
 - b. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi) pada poin:
 - 1) Dialog Antar-Muka (*Face to Face Dialogue*). Dimana komunikasi terjadi antara semua pihak, baik dari pihak Pemerintah Desa Tumpang, pihak Batik Selo Putri, hingga ke masyarakat desa.
 - 2) Membangun Kepercayaan (*Trust Building*). Dimana semua pihak saling percaya, sehingga kegiatan kolaborasi dapat dilaksanakan.
2. *Collaborative Governance* antara Pemerintah Desa Tumpang dengan Batik Selo Putri dalam program *OVOP* dinilai cukup baik, terutama pada poin Kepemimpinan Fasilitatif. Dimana semua pihak berperan dan setara dalam

melakukan kolaborasi. Akan tetapi menurut Batik Selo Putri, peran dari Pemerintah Desa Tumpang dinilai masih kurang. Karena manfaat yang dapat dirasakan oleh Batik Selo Putri dari diadakannya kolaborasi tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya.

3. *Collaborative Governance* antara Pemerintah Desa Tumpang dengan Batik Selo Putri dalam program *OVOP* dinilai kurang baik, terutama pada:

a. *Institutional Design* (Desain istitusional). Dimana sama sekali tidak ada aturan dasar, aturan main yang dibuat oleh Pemerintah Desa Tumpang selaku regulator maupun kontrak kerja sama atau *MOU* yang disepakati semua pihak dalam berkolaborasi.

b. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi) pada poin:

1) Komitmen Proses Kolaborasi (*Commitment to The Process*).

Dimana komitmen sudah bisa dirasakan semua pihak tapi masih belum maksimal. Menurut Batik Selo Putri, komitmen dari Pemerintah Desa Tumpang masih kurang. Karena tidak adanya *follow up* dari Pemerintah Desa Tumpang terhadap produk Batik Selo Putri terkait program *OVOP*. Selain itu peran dari masyarakat sebagai pengawas jalannya kolaborasi juga sama sekali tidak ada.

2) Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*). Dimana tidak

adanya kepastian *detail* informasi atau pemahaman dari pihak Pemerintah Desa Tumpang selaku inisiator kolaborasi berupa aturan tertulis atau hitam di atas putih yang membuat pihak Batik Selo Putri

maupun masyarakat kurang begitu memahami misi maupun regulasi dari kolaborasi yang dilakukan.

- 3) Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*). Dimana meskipun sudah tercapainya beberapa hasil sementara yang menjadi tujuan dari diadakannya kolaborasi. Akan tetapi hasil sementara masih belum maksimal untuk dapat dirasakan oleh semua peserta kolaborasi baik dari Batik Selo Putri maupun dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya *follow up* dari Pemerintah Desa Tumpang.

Jadi bisa disimpulkan bahwa, *Collaborative Governance* antara Pemerintah Desa Tumpang dengan Batik Selo Putri dalam program *OVOP* sudah dilakukan dan berjalan akan tetapi dinilai masih kurang baik. Dimana meskipun dalam kondisi awal kedua belah pihak sepakat untuk berkolaborasi karena memiliki tujuan yang sama yaitu perbaikan ekonomi pasca Pandemi *Covid-19* melalui program *OVOP* dan memberdayakan masyarakat desa. Semua pihak juga saling percaya karena terdapat komunikasi antar belah pihak menggunakan Dialog Antar-Muka (*Face to Face Dialogue*).

Akan tetapi masih terdapat kekurangan, seperti peran dan komitmen dari Pemerintah Desa Tumpang masih kurang, tidak adanya peran dari masyarakat sebagai pengawas jalannya kolaborasi, hingga hasil yang diharapkan dari kolaborasi masih belum maksimal. Hal itu dikarenakan tidak adanya *follow up* oleh Pemerintah Desa Tumpang terhadap Batik Selo Putri maupun masyarakat peserta pelatihan dan tidak adanya peraturan dasar kolaborasi maupun kontrak kerja sama atau *MOU*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan disimpulkan di atas, terdapat beberapa saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Dibutuhkan konsep, peraturan, atau regulasi secara *detail* dan tertulis yang mengatur ruang kolaborasi agar dapat berjalan secara maksimal dan dapat membuahkan hasil sesuai tujuan.
2. Pemerintah Desa Tumpang harus memberikan kejelasan terkait informasi *detail* dan kelanjutan dari program *OVOP*. Seperti mengadakan sosialisasi maupun promosi yang masif. Sosialisasi dan promosi tersebut dapat berupa pembuatan buku teknis *OVOP*, brosur, atau membuat konten mengenai *OVOP* di *web* resmi Desa Tumpang maupun sosial media. Jika Pemerintah Desa Tumpang kurang dapat memahami secara keseluruhan terkait program *OVOP*, sekiranya dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten maupun dinas terkait.
3. Untuk Batik Selo Putri sekiranya bisa lebih masif dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Tumpang terkait dengan kelanjutan dari program *OVOP* dan kolaborasi yang tengah dilakukan, seperti meminta pembuatan *MOU*. Bila perlu, dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak lainnya seperti dinas terkait. Untuk promosi produk, dapat mengajukan untuk dipromosikan di *website*/sosial media dari Desa Tumpang, BUMDes Tumpang, atau dapat menjadi sponsor berupa pembuatan seragam untuk PKK, kelompok pengajian, atau karang taruna Desa Tumpang.

4. Untuk masyarakat peserta pelatihan sekiranya dapat lebih inisiatif dan mandiri dalam mengembangkan keahliannya pasca pelatihan. Dengan cara mengikuti kursus tambahan, maupun belajar otodidak melalui media internet seperti *website* dan *YouTube*. Kemudian masyarakat yang mau melakukan kolaborasi dengan pemdes atau mau mendaftarkan produknya ke dalam *OVOP* dapat menghubungi pihak pemdes dengan mengajukan proposal pengajuan kerja sama atau proposal pengajuan pendaftaran produk *OVOP*. Selain itu masyarakat khususnya LSM Desa Tumpang juga agar bisa lebih berperan sebagai mana mestinya sebagai pengawas setiap kebijakan ataupun program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tumpang.
5. Untuk peneliti selanjutnya dapat fokus pada kasus tertentu, seperti *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata di Desa Tumpang. Atau dapat mengevaluasi *collaborative governance* yang telah berhasil dilakukan di Kabupaten Blitar. Atau peneliti selanjutnya juga dapat membandingkan *collaborative governance* yang satu dengan *collaborative governance* yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008) **Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdaya Masyarakat**. Jakarta, Rajawali Press.
- Astuti, Retno Sunu., Hardi Warsono., dan Abd. Rachim. (2020) **Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik**. Semarang, Universitas Diponegoro Press.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyanti. (2016) **Ekonomi Pembangunan Syariah**. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus. (2008) **Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik**. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Herdiansyah. (2019) **Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial**. Jakarta, Salemba Humanika.
- Indriantoro, Nur., dan Bambang Supomo. (2013) **Metodologi Penelitian Bisnis**. Yogyakarta, BFEE UGM.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. (2015) **Sosiologi Perdesaan**. Bandung, Pustaka Setia.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996) **Pembangunan Untuk Rakyat**. Jakarta, Pustaka Cidesindo.
- Katorobo, James. (2005) **Decentralization and Local Autonomy for Participatory Democracy, 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance, Seoul, Republic of Korea**. Seoul, Republic of Korea.
- Kementerian Perindustrian. (2012) **Buku Petunjuk Teknis: Penilaian, Klasifikasi, Dan Pembinaan Produk OVOP**. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. (2009) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. (2005) **Metode Penelitian**. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Adisasmita. (2013) **Pembangunan Perdesaan**. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Suharto, Edi. (2009) **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat**. Bandung, Refika Adiatma.
- Sugiyono. (2017) **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D**. Bandung, Alfabeta.
- Sumarto, Hetifa. (2003) **Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance**. Bandung, Yayasan Obor Indonesia.
- Tambunan, Tulus. (2002) **Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Beberapa Isu Penting**. Jakarta, Salemba Empat.
- Ulum, Ihyaul., dan Hafiez Sofyani. (2016) **Akuntansi Publik**. Malang, Aditya Media Publishing.
- Wahyudiono., Widyastuti., dan Aminatuzzuhro. (2019) **Manajemen Umkm: Orientasi Peran Stakeholder Dalam Membangun Daya Saing UMKM**. Surabaya, Putra Media Nusantara.
- Wijaya, Emiliana Sri., dan Aris Toening. (2018) **Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)**. Demak, Pustaka Magister.

Yunus, Saifuddin., Suadi., dan Fadli. (2017). **Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu**. Aceh, Bandar Publishing.

Zahroul, Chumi F. (2008) **Buku Diktat Koperasi Indonesia**. Universitas Negeri Jember.

Skripsi dan Jurnal:

Abdurrohman., Afifuddin, A., dan Anadza, H. (2020) **Sinergisitas Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Desa Plosorejo Kec. Kademangan Kab. Blitar)**. Respon Publik, Volume 14 (2), 11-23.

Ansell., dan Gash. (2007) **Collaborative Governance in Theory and Practice**. Journal of Public Administration Research and Theory. Volume 18.

Dimiyati, Elverda Kamara. (2016) **Implementasi Program One Village One Product (OVOP) Dan Dampaknya Pada Peningkatan Keuntungan Peternak Sapi Perah Di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat**. Skripsi Universitas Pasundan.

Intikaroh, Nia., dan Zakariya. (2020) **Collaborative Governance Dalam Pengelolaan UMKM Tenun Troso Di Kabupaten Jepara**. Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Leman, Lutfi Andrianto. (2018) **Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Pariwisata Religi Sunan Giri Di Kabupaten Gresik**. Skripsi Universitas Airlangga.

Lestari, Umi Fitriana. (2017) **Collaborative Governance Program One Village One Product (OVOP) Di Kabupaten Bantul Tahun 2016**. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Napir, Suaib., dan Yoslan Koni. (2019) **Model Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Desa Online Di Kabupaten Pohuwato**. Jurnal Studi Kepemerintahan.

Nurhidayatullah. (2018) **Implementasi Program One Village One Product Kabupaten Kulon Progo Pada Tahun 2017**. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sari, Delima., dan Zulaika Matondang. (2019) **Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Mengurangi Pengangguran Di Kota Panyabungan**. Laporan Penelitian LPPM IAIN Padangsidipmu.

Simatupang, T.M., dan Sridharan, R. (2008) **Design For Supply Chain Collaboration**. Business Process Management Journal.

Subiantoro, Jhevanda. (2019) **Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Program One Village One Product Kendang Jimbe Di Kota Blitar**. Skripsi Universitas Airlangga.

Winarni, I. M. Y., Muchsin, S., dan Sekarsari, R. W. (2020). **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi pada pemanfaatan limbah cangkang kerang di Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)**. Respon Publik, Volume 14 (3), 58-68.

Website:

- Alana, Nur Ana. (2022) *One Village One Product*, Upaya Pemkab Blitar Dongkrak Perekonomian Warga, Bupati Manfaatkan Potensi. AGTVNews.Com. Diakses 20 Januari 2023. Dari <<https://www.agtvnews.com/plat-ag/pr-582403942/one-village-one-product-upaya-pemkab-blitar-dokrak-perekonomian-warga-bupati-manfaatkan-potensi>>.
- Ati. (2022) Batik Selo Putri Produk Unggulan UMKM Desa Tumpang Kabupaten Blitar. Informasi Realita.net. Diakses 20 Januari 2023. Dari <<http://informasi-realita.net/2022/10/05/batik-selo-putri-produk-unggulan-umkm-desa-tumpang-kabupaten-blitar/>>.
- Desa Tumpang. (2021) Diakses 20 Januari 2023. Dari <<https://tumpang-talun.desa.id/>>.
- Dinas Koperasi Kabupaten Kulon Progo. Diakses 20 Januari 2023. Dari <<https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/147/ovop-indonesia>>.
- Kominfo Jatim. (2022) Bupati Blitar Dorong Program *OVOP* Tumbuhkan Perekonomian Desa. Diakses 20 Januari 2023. Dari <<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bupati-blitar-dorong-program-ovop-tumbuhkan-perekonomian-desa>>.
- Novi. (2022) Bupati Blitar Sambangi Desa Kendalrejo Dan Tumpang, Minta DPMTSP Dampingi UMKM. Mitratoday.com. Diakses 20 Januari 2023. Dari <<https://www.mitratoday.com/bupati-blitar-sambangi-desa-kendalrejo-dan-tumpang-minta-dpmtsp-dampingi-umkm/>>.
- OVOP* Indonesia. Diakses 20 Januari 2023. Dari <<https://ovop.kemenperin.go.id/>>.

Dokumen:

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M/-IND/9/2007.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.